

Dr. Haeruddin Saleh, S.E., M.Si.



Dinamika dan Kebijakan PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Dinamika dan Kebijakan PEBANGUANAN EKONOMI DI INDONESIA

DR. HAERUDDIN SALEH, S.E., M.SI.



Dinamika dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Indonedia

Penulis:

Dr. Haeruddin Saleh, S.E., M.Si.

Editor:

Sobirin, S.S., M.Si.

ISBN: 978-602-5885-99-0

Desainer Grafis:

Tim Kreatif Eksismedia

Penata Letak:

Rian M. Firdaus, S.T.

Desainer Cover:

M. Zaenal Muttaqin

Diterbitkan oleh:

Penerbit Eksismedia Grafisindo (Eksisgraf) Anggota Ikapi Kompleks Margahayu Raya (Metro), Jln. Saturnus Tengah III, No. 11, Bandung 40286 Telp. 0822 3311 8789

E-mail: eksisgraf@gmail.com

Cetakan Pertama: Agustus 2020

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa Izin tertulis dari Penerbit.

PRAKATA

Sejak Indonesia merdeka, bangsa Indonesia sudah mencatat kondisi perekonomian. Bahkan, kondisi perekonomian pada sebelumnya sudah terekam dengan baik. Sepanjang sejarah Indonesia, pasti kita dapat menemukan kapan Indonesia memasuki masa keemasan, kapan mengalami masa kemunduran. Pada masa sebelumnya pun sama, Indonesia yang memiliki nama Nusantara dengan berbagai perbedaan, baik tempat, suasana, serta perbedaan secara terang-benderang sudah diindera oleh kita semua.

Buku berjudul 'Dinamika dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Indonedia' ini memang berisi cerita, tetapi ia bukan buku sejarah. Namun, buku ini berisi sejarah ekonomi Indonesia. Tentu, hal itu berkaitan dengan sejarah. Meskipun sejarah hanya merupakan rentetan kejadian yang ada dalam kaitan perkembangan ekonomi.

Dalam naskah tulisan ini dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian Indonesia, misalnya Masalah yang Menyertai Pembangunan Ekonomi, Karakteristik Perekonomian Indonesia, Pilihan Strategi Pembangunan Ekonomi, Peran dan Kebijaksanaan Pemerintah, sampai pada hal Prinsip-Prinsip Perdagangan Internasional, Kerjasama Ekonomi Regional – Internasional, dan Analisis Kebijakan dan Kerjasama Ekonomi Internasional.

Dengan membaca bab-bab dalam buku ini, pembaca dapat memahami tentang perekonomian Indonesia, yang pada akhirnya dapat menyimpulkan tentang sistem perekonomian Indonesia. Akhirnya, penulis berharap dengan membaca buku ini pembaca dapat memahami isi buku ini.

Makassar, Agustus 2020 *Penulis*,

Dr. Haeruddin Saleh, S.E., M.Si.

•

DAFTAR ISI

| PRAKA | ΓA | | iii |
|---------|--|--|--------------------------|
| DAFTAI | R ISI. | | ν |
| BAB I | SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA | | |
| | A. B. C. D. E. | Pemerintah Orde Lama Pemerintah Transisi Pemerintah Reformasi Pemerintah Gotong Royong Beberapa Isu Penting | 3 6 10 |
| BAB II | RUANG LINGKUP DAN KARAKTERISTIK PEREKONOMIAN INDONESIA | | |
| | A. B. C. D. | Masalah yang Menyertai Pembangunan Ekonomi | . 35 . 39 |
| BAB III | SISTEM EKONOMI INDONESIA | | |
| | A. B. C. | Konsep Sistem Ekonomi | . 58 |
| BAB IV | PELAKU DAN PERAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA | | |
| | A. B. C. D. | Latar Belakang Persoalan Pelaku-Pelaku Ekonomi Peran dan Fungsi Perekonomian Analisis Kebijakan yang Relevan | . 76 . 79 |
| BAB V | TRA | NSFORMASI STRUKTURAL PEREKONOMIAN INDONESIA | . 89 |
| | A. B. C. D. | Transformasi Struktural Perekonomian Indonesia | . 93 96 |
| BAB VI | AN | GGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA | 105 |
| | A. B. C. D. | Fungsi dan Peran APBN | 108 . 112 |
| BAB VII | PERDAGANGAN DAN PEMBAYARAN INTERNASIONAL | | |
| | A. B. C. D. E. | Konsep dan Unsur-Unsur Neraca Pembayaran. Konstelasi Perdagangan Dunia. GATT 1994 dan Kesiapan Indonesia. Transaksi Berjalan Indonesia. Neraca Modal dan Cadangan Devisa. Kebijakan-Kebijakan. | 127 129 135 139 |
| | ۲. | Neuijakaii-Neuijakaii | 14. |

| | B. C. D. | Peran Sektor Moneter Indonesia | 155 161 167 |
|------------------|----------------|---|-------------------|
| BAB IX | PER | ekonomian indonesia dalam era globalisasi | 185 |
| | В. | Prinsip-Prinsip Perdagangan Internasional | 189 |
| DAFTAR TENTAN | | | |

SINOPSIS

Dalam kondisi awal kemerdekaan, keadaan ekonomi dapat dibilang sangat tidak menggembirakan. Hal itu terjadi karena adanya inflasi yang disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Oktober 1946 Pemerintah RI mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang, namun adanya blockade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas Negara. Akibatnya Negara berada dalam kondisi krisis keuangan dan kondisi itu tentu membahayakan bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia pada saat itu.

Masa kekuasaan Soeharto adalah yang terpanjang dibandingkan presiden lain Indonesia hingga saat ini. Pasang surut perekonomian Indonesia juga paling dirasakan pada eranya. Ia menjadi presiden di saat perekonomian Indonesia tak dalam kondisi baik. Pada 1967, ia mengeluarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing. UU ini membuka lebar pintu bagi investor asing untuk menanam modal di Indonesia.

Penjelasan di atas memberikan gambaran positif tentang perekonomian pada masa Orde Baru. Memang betul bahwa perekonomian berkembang dengan cepat dan bersama dengan itu ada perbaikan-perbaikan dalam pembangunan sosial (walapun dalam kecepatan yang lebih lambat). Secara khusus, pengurangan kemiskinan absolut adalah pencapaian Pemerintah yang luar biasa. Di pertengahan 1960an setengah dari populasi Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan namun pada tahun 1996, angka ini telah berkurang menjadi 11% dari total populasi Indonesia. Kendati begitu, gaya pemerintahan Pemerintah Orde Baru mengimplikasikan konsekuensi-konsekuensi berbahaya yang akan memuncak pada Krisis Finansial Asia pada akhir 1990an.

Bacharuddin Jusuf Habibie, wakil presiden dalam kabinet terakhir Suharto maka - berdasarkan hukum - menggantikan Suharto sebagai presiden Indonesia berikutnya, beralih kepada sosok teknokrat ekonomi untuk mengatasi krisis finansial yang sedang berlangsung. Hal ini mengakibatkan dibuatnya perjanjian keempat dengan IMF. Perjanjian ini ditandatangani pada bulan Juni 1998 dan memungkinkan terjadinya defisit anggaran yang lebih longgar sementara dana baru dialirkan ke dalam perekonomian.

Indonesia sedang menuju demokrasi yang benar, meskipun ini adalah suatu proses yang juga disertai dengan berbagai hambatan. Pemerintahan otoriter yang pernah berkuasa selama beberapa decade telah mematikan aktivitas politik masyarakat dan lembaga-lembaga politik hingga batas-batas tertentu. Butuh waktu sebelum negara ini dapat meninggalkan sebutan negara 'demokrasi cacat' ('flawed democracy') yang diukur oleh Unit Kecerdasan Ahli Ekonomi untuk Indeks Demokrasinya. Akan tetapi pemilihan umum yang adil dan bebas memberikan kepastikan bahwa ada dukungan yang lebih besar bagi pemerintah selama periode Reformasi dibandingkan masa sebelumnya. Keputusan untuk memilih presiden secara langsung oleh rakyat Indonesia merupakan salah satu keputusan yang penting secara psikologis. Meskipun demikian, perlu digarisbawahi bahwa iklim politik di Indonesia lebih rapuh (dengan kata lain kurang

stabil) dibandingkan dengan demokrasi yang sudah lama dibangun karena banyak kelompok (yang visinya berbeda) mencoba membangun posisi mereka pada demokrasi yang masih belum matang. Laporan lebih lengkap tentang topik ini silakan kunjungi bagian Reformasi.